

KEMISKINAN INFORMASI PADA MASYARAKAT MARJINAL DI INDONESIA

Oleh

Laksmi, M.A.*

Barang siapa memegang akses informasi, dialah yang akan memenangkan persaingan (Alfan Toffler, dari Powershiff yang dikutip oleh Pradipto, 2000)

Abstrak

Keprihatinan pada tingginya angka kemiskinan di Indonesia yang terjadi pada masyarakat marjinal saat ini melatarbelakangi gagasan tulisan ini. Salah satu faktor penyebab keadaan tersebut adalah bahwa masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai untuk memberdayakan diri sendiri. Keadaan tersebut memaksa mereka untuk bergantung pada bantuan Pemerintah atau orang lain. Berdasarkan fakta tersebut, tulisan ini berupaya memetakan kebutuhan informasi pada masyarakat marjinal di Indonesia berdasarkan komponen kesejahteraan hidup. Dengan memahami hal tersebut berikut penyebabnya, diharapkan pekerja informasi dapat lebih memahami kebutuhan informasi masyarakat agar dapat membantu Pemerintah dalam penyediaan akses informasi yang betul-betul dibutuhkan, tepat dan cepat kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kemiskinan Informasi; Masyarakat Marjinal

LATAR BELAKANG

Masyarakat marjinal – kadang-kadang disebut juga sebagai kelompok rentan, merupakan sekelompok orang yang terpinggirkan oleh tatanan kemasyarakatan, baik dalam bidang ekonomi, politik dan budaya, yang tidak berpihak pada mereka. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah kaum miskin secara keseluruhan, yaitu buruh, petani miskin, nelayan, pedagang kecil, perempuan, anak-anak, masyarakat *disfable* dan kaum miskin perkotaan.

Hingga tahun 2003, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia masih tetap tinggi, yaitu 17,4 persen. Bahkan pada tahun 2001,

* Staf pengajar di Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia

berdasarkan survei Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) persentase keluarga miskin mencapai 52,07 persen.

Definisi kemiskinan di sini dikaitkan dengan keadaan seseorang yang tidak sejahtera atau serba kekurangan dalam kehidupan sosial ekonomi. Kesejahteraan tersebut dicerminkan dalam lima komponen yaitu keadaan demografi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, fertilitas dan keluarga berencana, serta perumahan dan permukiman. Pemerintah telah melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan sejak awal kemerdekaan, masa orde baru hingga kampanye pemilihan presiden yang baru saja dilakukan. Pola penanggulangan cenderung bersifat praktis dan berjangka pendek, misalnya seperti pembagian beras untuk rakyat miskin, pembagian beasiswa sekolah yang tidak merata, program jaring pengaman sosial atau JPS untuk orang miskin, dan masih banyak lagi. Menurut Ritonga, penyebab kegagalan program pemerintah tersebut disebabkan karena 2 faktor, yaitu tujuan bantuan yang diberikan tidak jelas dan kurangnya pemahaman tentang penyebab kemiskinan itu sendiri, yang sangat variatif di berbagai daerah.

Tujuan bantuan yang diberikan Pemerintah hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan pengobatan. Jika bantuan habis, kebutuhan itu akan muncul kembali, dan proses di atas berulang. Masyarakat yang seolah-olah tanpa daya akan terbiasa menanti uluran tangan berikutnya. Lingkaran itu tidak akan putus jika masyarakat tidak diajarkan bagaimana memberdayakan diri sendiri dan lingkungannya. Mengenai pemberdayaan ini erat kaitannya dengan faktor kedua, yaitu kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab dasar kemiskinan.

Berpijak pada pernyataan Toffler di awal tulisan ini, bahwa orang sukses karena memiliki informasi yang tepat dan pada saat yang tepat. Seorang nelayan ketika menemui masalah seperti perolehan ikan yang sedikit, atau tidak bisa melaut karena badai, atau masalah lainnya, karena mereka tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pemahaman mengenai suatu masalah dan juga penyelesaiannya, dapat dilakukan melalui ketersediaan informasi seluas mungkin. Membantu masyarakat membuka mata

bahwa mereka mampu menolong diri sendiri tanpa bantuan orang lain atau Pemerintah adalah penting dilakukan.

KEMISKINAN INFORMASI

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan kemiskinan informasi di kalangan masyarakat marjinal melalui kasus-kasus yang diberitakan dalam surat kabar, dan mencoba memahami penyebabnya.

Peradaban umat manusia sedikit banyak, langsung tidak langsung ditentukan oleh eksistensi informasi. Dimulai dari masyarakat purba yang menggambar dinding gua, bahasa bunyi-bunyian atau isyarat asap, yang semuanya menggunakan teknologi sederhana dari hasil alam, kemudian berkembang menjadi masyarakat tradisional, masyarakat industri, dan hingga kini masyarakat modern, ditambah dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, masyarakat tersebut disebut sebagai masyarakat informasi (*information society*). Di sini, informasi yang merupakan hasil dari pengolahan data dan fakta menjadi komoditas. Informasi yang lengkap, valid, cepat dan sesuai dengan kebutuhan bernilai tinggi jika dimanfaatkan untuk menghasilkan analisis yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan.

Yang dimaksud dengan masyarakat yang miskin informasi yang dikutip dari Goulding oleh Jaeger (2004) adalah mereka yang dikelilingi oleh informasi yang berlimpah dan kemudahan akses memperolehnya, dan mereka yang tidak tahu bagaimana dan di mana mendapatkan informasi dan tidak mengerti nilai informasi. Kelompok pertama merupakan orang-orang yang beruntung tetapi tidak tahu bahwa mereka beruntung. Informasi yang melimpah dalam era globalisasi ini malah membuat mereka kebingungan. Informasi tersebut bisa saja hanya mengenai satu topik, tetapi karena datang dari berbagai media dan dalam kemasan yang berbeda, kemungkinan malah dapat mengacaukan dan meracuni pikiran seseorang.

Sebaliknya dalam kelompok kedua, mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan informasi tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Sayangnya, tidak terpenuhinya kebutuhan akan informasi tertentu tersebut, tidak disadari dampak buruknya pada kehidupan sehari-hari.

Dalam dunia bisnis, informasi adalah vital. Dalam era globalisasi, dengan sarana teknologi komunikasi canggih, informasi telah mengubah dunia. Bukan memperbudak dunia, tetapi menjadi sesuatu yang sangat berharga. Informasi yang diolah dengan tepat sangat membantu seseorang memformulasikan suatu masalah, menentukan yang penting dan tidak penting, sehingga pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah dilakukan dengan tepat. Televisi BBC pernah melontarkan kalimat berikut :

Now information is starting to redefine our world, its geography and its economy. What would the world look like if information was money? And who would be running it?

Keberlimpahan dan kemudahan akses informasi menghilangkan jarak dan mempersingkat waktu seseorang di satu belahan bumi untuk memperoleh informasi atau mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di belahan bumi lainnya. Jadi tidak ada masalah dengan geografi. Komunikasi yang lancar tersebut otomatis memperlancar perdagangan dunia, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat yang kaya informasi, tingkat perekonomiannya juga tinggi. Ekonomi tinggi memunculkan kehidupan sejahtera.

KASUS-KASUS KEKURANGAN INFORMASI

Kasus-kasus yang memperlihatkan kurangnya informasi dalam masyarakat marjinal berikut diambil dari berita-berita surat kabar mulai tahun 2000 hingga 2004. Kumpulan berita tersebut dikelompokkan ke dalam 3 aspek kesejahteraan, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

1. Kesehatan

Kesejahteraan yang menyangkut masalah kesehatan mencakup keluhan sakit, kejiwaan, kecelakaan dan pemanfaatan rumah sakit oleh masyarakat. Berdasarkan data BPS (1999), frekuensi keluhan kesehatan relatif sama antara masyarakat perkotaan (24%) dan pedesaan (24,42%), dan yang banyak diderita adalah penyakit pilek, batuk, panas, sakit kepala dan asma. Kelompok kesehatan juga mencakup masalah kematian bayi dan balita, serta usia harapan hidup, fertilitas, dan masalah keluarga berencana.

TAHUN	JUDUL DAN SUMBER	KASUS DALAM KESEHATAN
2000	Remaja butuh pengetahuan soal kesehatan reproduksi (<i>Suara Pembaruan</i> , 20 Agustus 2000)	Ketidaktahuan remaja akan risiko kesehatan reproduksi, seperti kehamilan di usia muda, aborsi, penyakit menular seksual, atau kekerasan seksual, diduga penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Survei Kesehatan Rumah Tangga tahun 1995 melaporkan bahwa hanya 373 per 100.000 kelahiran hidup.
2000	Masyarakat berhak mendapatkan informasi (oleh Dini Budlhandayani, <i>Republika</i> , 5 Juni 2000).	Masalah peredaran obat palsu di tengah masyarakat. Sosialisasi informasi mengenai obat-obat yang terdaftar secara resmi dan aman dikonsumsi belum diperhatikan secara serius oleh pemerintah.
2000	Sistem informasi kesehatan perlu ditata kembali (<i>Suara Pembaruan</i> , 28 Oktober 2000)	Informasi tentang kesehatan diperlukan untuk dijadikan dasar merumuskan pemecahan masalah dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta penilaian program kesehatan secara terintegrasi berdasarkan data epidemiologi.
2001	Kebanyakan remaja dapat informasi seks yang salah (<i>Republika</i> , 13 Juni 2001)	81% remaja di Sulawesi Selatan memperoleh informasi seks dari film, yang kebanyakan mengajarkan perilaku seks bebas.
2001	Penyimpangan seks pada anak makin meresahkan: akibat derasnya arus informasi (<i>Media Indonesia</i> , 2 April 2001)	Informasi mengenai seks yang baik sangat kurang. Sementara itu anak-anak dengan mudah mendapatkan informasi seks yang tidak baik melalui berbagai media elektronik.
2001	Sulit didapatkan data akurat penderita epilepsi (<i>Kompas</i> , 30 April 2001)	Kurangnya data akurat tersebut menyebabkan sulitnya pemberian pengobatan, baik bagi penderita maupun praktisi medik.
2002	Nasib pusat informasi keracunan Indonesia masih suram (<i>Kompas</i> , 25 Agustus 2002)	Kondisi Sentra Informasi Keracunan (Sentra) – bekerjasama dengan Depkes – yang dibentuk pada 27 November 1995 melemah karena ketiadaan dana operasional. Badan ini membantu masyarakat menangani kasus keracunan akibat tempe bongkrek, jengkol, ikan buntok, dsb.
2004	Info pemerintah soal flu burung	Keterlambatan Informasi ini

	lamban (<i>Kompas</i> , 27/1/2004)	menyebabkan kerugian para peternak ayam dan ketakutan masyarakat untuk mengonsumsi daging ayam.
2004	Tak paham hak anak picu kekerasan terhadap anak (<i>Kompas</i> , 6 Juli 2004)	Kekerasan terhadap anak, baik fisik dan mental, merupakan penyakit kejiwaan. Masih banyak masyarakat yang menganggap hal tersebut sebagai urusan domestik. Lembaga Perlindungan Anak di Jateng mencatat bahwa sepanjang Januari-November 2003, ada 285 kasus kekerasan & eksploitasi atas anak.
2004	Angka gizi buruk stagnan selama 10 tahun terakhir (<i>Kompas</i> , 5 Februari 2004)	Orangtua kurang pengetahuan tentang gizi pada balita. Dampak kurang gizi terlihat pada indeks pembangunan manusia (HDI) yang menurun. Tahun 2003, HDI Indonesia di peringkat 112 dari 175 negara.

2. Pendidikan

Kesejahteraan dalam pendidikan mencakup status pendidikan, tingkat pendidikan formal yang ditamatkan dan tingkat melek huruf penduduk. Yang perlu disikapi lebih serius dari temuan BPS (1999) adalah bahwa jumlah perempuan yang tidak/belum pernah sekolah yang berumur 10 tahun ke atas (13,53%) dua kali lipat dari jumlah laki-laki (5,97%). Padahal peran perempuan sangat besar dalam pendidikan anak di keluarga.

Tingginya tingkat pendidikan yang dicapai rata-rata penduduk mencerminkan kualitas intelektualitas SDM suatu bangsa. Di Indonesia, penduduk yang bersekolah hingga tingkat perguruan tinggi (diploma dan sarjana) hanya 3,10 persen, sedangkan yang mencapai jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas rata-rata di bawah 50 persen.

TAHUN	JUDUL DAN SUMBER	KASUS DALAM PENDIDIKAN
2000-2004	--	Berita-berita yang terkait dengan pendidikan. Kasus-kasus yang diakibatkan kurangnya sosialisasi informasi, seperti munculnya UAN (Ujian Akhir Negara), perguruan tinggi yang tidak lagi disubsidi Pemerintah sehingga SPP melonjak, dsb.
2000	Rendah, minat masyarakat memanfaatkan perpustakaan (<i>Kompas</i> , 23 Mei 2000)	Masyarakat belum mengetahui manfaat perpustakaan dan pentingnya membaca, sehingga menghambat proses pembelajaran masyarakat.
2000	Informasi iptek di Indonesia belum memadai (<i>Republika</i> , 15 Agustus 2000)	Peluncuran portal iptek oleh Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) yang menilai bahwa informasi tentang iptek masih sangat kurang.
2003	Indonesia tertinggal di bidang hak kekayaan intelektual (<i>Kompas</i> , 23 Juli 2004)	Ketidaktahuan HAKI dalam masalah paten menyebabkan kerugian pada perusahaan atau penelitian yang terkait. Di Jepang terdaftar 710, tapi di Indonesia hanya setengahnya, yaitu 370.
2004	--	Masalah pertanahan yang menyangkut sekolah. Sengketa tanah seperti yang terjadi antara SLTP 56 di Kebayoran Baru dengan Pemerintah.
2004	Jenjang pendidikan dasar: rendahnya minat baca siswa (<i>Republika</i> , 25 Juni 2004)	Bacaan yang kurang dan minimnya sarana perpustakaan sekolah menurunkan minat baca siswa, sehingga menghambat perkembangan wawasan & pengetahuan.

3. Ekonomi

Masalah ketenagakerjaan mencakup komposisi angkatan kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan dan jumlah jam kerja. Lapangan kerja yang terbanyak dimiliki penduduk adalah sektor pertanian (44,92%), perdagangan (19,39%) dan jasa (13,55%).

Kesejahteraan ekonomi juga mencakup masalah perumahan, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini semakin lama semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Terbatasnya lahan dan mahalnya harga jual sebuah rumah sangat

menghambat kesejahteraan penduduk. Kondisi rumah di banyak provinsi di Indonesia masih beratap seng/asbes (di Sumbar, Bengkulu, dan Sumut masing-masing 93,44%, 86% dan 82,29%). Masalah perumahan lainnya adalah kondisi yang kurang memadai, seperti lantai semen atau tanah, fasilitas air, penampungan air kotor, dan lain sebagainya.

TAHUN	JUDUL DAN SUMBER	KASUS DALAM MASALAH EKONOMI
2000	Pengusaha kesulitan informasi ekspor (<i>Media Indonesia</i> , 7 Agustus 2000)	Pengusaha sulit menemukan informasi mengenai peluang pasar di luar negeri. Disarankan agar pengusaha membuat jaringan, dan mempromosikan profile perusahaan melalui buku panduan dan internet.
2000	Data perikanan tak bisa dipercaya (<i>Kompas</i> , 18 Juli 2000)	Data statistik tentang potensi perikanan, menurut Menteri Eksplorasi Laut & Perikanan, Sarwono Kusumaatmadja, tidak bisa dipercaya sebab kelompok nelayan masih miskin dan berebut lahan.
2000	Upaya menelusuri keberadaan asset Pemda: DPRD sayangkan ketertutupan biro perlengkapan DKI (<i>Suara Pembaruan</i> , 2 Juli 2000)	Kasus-kasus karena kurangnya informasi tentang peruntukan tanah, sehingga banyak berita mengenai sengketa tanah dalam masyarakat. Misalnya, aset Pemda di kawasan Ancol yang semula 650 hektar, sekarang menjadi 300 hektare, pengurusan tanah rakyat
2000	Perlu informasi geologi yang mudah dimengerti (<i>Suara Pembaruan</i> , 7 Desember 2000)	Kurangnya pemahaman geologi menyebabkan banyaknya korban jiwa dan harta akibat bencana alam yang banyak terjadi di Jawa, Sumatra dan Sulawesi.
2001	Pusat layanan informasi pariwisata: dulu berjaya, kini tinggal kenangan (<i>Kompas</i> , 27 Februari 2001)	Kurangnya pengetahuan masalah Indonesia menyebabkan menu-runnya devisa dari sektor ini, baik dari wisatawan lokal maupun internasional.
2001	Presiden Abdurrahman Wahid: data kependudukan simpang siur (<i>Kompas</i> , 12 Juli 2001)	Tidak ada data yang pasti tentang kependudukan menyebabkan kesalah-lahan dalam mengembangkan pola pembangunan dan pengambilan keputusan, termasuk mengantisipasi perubahan sosial.
2004	Pengusaha perikanan sulit untuk mendapatkan data (<i>Kompas</i> , 8	Kesalahan data mengenai lonjakan impor udang yang menyebabkan kerugian bagi

	Juli 2004)	produsen lokal, sehingga pemerintah sulit menentukan kebijakan yang tepat.
2004	--	Masalah pengangguran semakin meningkat. Masyarakat tidak tahu harus mencari informasi kemana.
2004	--	TKI/TKW banyak mengalami musibah di negeri orang karena ketidakpahaman budaya lain dan masalah rendahnya pendidikan yang mereka miliki.
2004	Penyaluran JPK Gakin terkendala database orang miskin (<i>Republika</i> , 26 Juni 2004)	Di Jakarta, penyaluran dana kesejahteraan bermasalah karena data orang miskin tidak akurat.
2004	Masyarakat sulit mengakses data pemilu dan data diri caleg (<i>Kompas</i> , 5 April 2004)	Kurangnya pengetahuan mengenai caleg mengakibatkan salah pilih wakil. Wakil rakyat yang buruk akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

JANGKAUAN MASYARAKAT MARJINAL

Kasus-kasus yang banyak dihadapi oleh masyarakat marjinal tersebut bisa diatasi jika mereka memiliki informasi yang tepat. Pusat dokumentasi dan informasi (selanjutnya Pusdokinfo) sebagai 'agent of change' yang ada saat ini, baik dari Pemerintah maupun lembaga non pemerintah belum dikenal oleh sebagian besar masyarakat luas. Kalaupun sudah dikenal, masyarakat masih belum familiar untuk memanfaatkannya. Sementara itu, informasi yang tersedia di internet tidak terjangkau oleh masyarakat marjinal.

Setiap orang memiliki kebutuhan dan pola pencarian informasi yang berbeda-beda. Kedua hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pendidikan, status sosial termasuk lingkup dan cara pergaulannya, waktu dan pengalaman. Umumnya, orang-orang yang tergolong mampu memperoleh privilege dan kesempatan mendapatkan informasi yang lebih baik dari kaum marjinal. Pendidikan yang lebih baik sangat membantu dalam mencerna informasi, baik dari segi bahasa maupun substansinya. Keuangan yang lebih baik tidak memusingkan mereka untuk menyewa akses informasi, tambahan pula, semakin status sosial seseorang tinggi, semakin mudah ia masuk ke kelompok komunitas yang lebih besar. Dengan sendirinya ia akan membentuk jaringan-jaringan yang sangat memudahkan kehidupannya selanjutnya.

Kebutuhan dan perilaku pencarian informasi yang terdiri dari suatu aktivitas bersifat kompleks tentu saja sulit diharapkan berjalan mulus pada masyarakat marjinal. Jangankan menyadari bahwa mereka membutuhkan informasi ketika menemui kesulitan, pengetahuan tentang sumber informasi, di mana harus mencari dan keterampilan mengolah serta memahami informasi saja tidak ada. Gejala ini terlihat jelas dengan munculnya berbagai kasus dalam kehidupan masyarakat yang terekam dalam teks-teks berita di atas.

Masalah ini juga terkait erat dengan budaya bangsa Indonesia yang terkenal dengan budaya lisan. Cara hidup budaya ini lebih menekankan aktivitas berbicara dan mendengar, daripada membaca dan mencatat. Informasi yang diucapkan kemudian didengar oleh pihak lain, akan cepat hilang, sebab pada dasarnya manusia adalah mahluk pelupa. Dalam budaya tulis, seseorang yang banyak membaca, akan terdorong untuk berpikir dan menganalisa informasi yang diperolehnya. Kemudian tahap berikutnya, ia akan terpicu untuk menulis gagasannya sendiri dari hasil analisa. Selain itu, ketrampilan teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat Indonesia belum berkembang dengan baik.

Perkembangan teknologi jauh lebih cepat dari kemampuan mencerna masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa, besar kemungkinan akan terjadi degradasi informasi, di mana informasi tidak sampai kepada masyarakat atau diterima dengan penafsiran yang salah.

PENYEDIA JASA INFORMASI

Seperti yang dinyatakan UPC (Urban Poor Consortium) bahwa salah satu penyelesaian masalah kemiskinan adalah dengan menyediakan akses informasi seluas-luasnya. Pusat-pusat informasi, seperti perpustakaan konvensional, perpustakaan digital, clearing house, biro pusat statistik, termasuk pusat-pusat penelitian, seperti PDII-LIPI, Lembaga penelitian di berbagai perguruan tinggi, pusat pengembangan di berbagai perusahaan, jumlahnya belum banyak di masyarakat. Tercatat pula organisasi swasembada masyarakat yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu, seperti The Ridep Institute (merekam berbagai bentuk peristiwa sejarah dalam masa transisi politik di Indonesia), ICW atau Indonesian Corruption Watch (merekam data-data tentang korupsi), Departemen-departemen pemerintah, Jaringan Iptek, Jaringan perpustakaan perguruan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, dan jaringan dengan

luar negeri, seperti INIS (jaringan dalam bidang sejarah Islam), Technonet Asia, Agris, dan lain sebagainya. Sayangnya, informasi terhadap keberadaannya kurang menyebar di masyarakat. Kualitas dan kuantitas informasi yang dimiliki, meski tidak semua lembaga, tidak begitu baik.

Meskipun demikian, banyak langkah positif yang telah diambil untuk mengatasi kemiskinan informasi ini. Pengembangan perpustakaan-perpustakaan di pelosok-pelosok mulai ditumbuhi (Presiden meresmikan 50 rumah baca di seluruh Indonesia, *Kompas*, 11 Maret 2004), undang-undang kebebasan informasi terus disempurnakan, pembangunan e-Government diupayakan terus, dan beberapa LSM yang mengembangkan clearing house, seperti Pusat layanan narkoba GSP 18 (*Kompas*, 10 Februari 2004) oleh Guruh Soekarnoputra atau Pusat Pelayanan Terpadu PRT, yang digagas oleh pemerintah yang bekerjasama dengan organisasi penyalur pramuwisma.

KESIMPULAN DAN ORGANISASI

Dari ulasan di atas mengenai kasus-kasus nyata yang terjadi dalam masyarakat marjinal di Indonesia, jelas terlihat bahwa ketersediaan informasi mendesak untuk diadakan, agar mereka mampu berdiri sendiri. Hak memperoleh informasi merupakan hak bagi setiap kelompok warganegara, bahkan yang terpinggirkan sekalipun.

Penyediaan informasi oleh pekerja informasi atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sebaiknya mencakup informasi dalam kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan demikian substansi informasi yang disebarkan benar-benar dibutuhkan. Teknik diseminasi informasi juga disesuaikan dengan kelompok masyarakat marjinal, baik darisegi pendidikan, budaya, gaya hidup dan sebagainya. Meskipun diprediksi bahwa tahun 2015, setengah penduduk dunia akan memiliki akses ke Internet dan pemerintah mengupayakan piranti lunak dengan harga yang terjangkau, belum menjamin bahwa masyarakat marjinal akan menggunakannya.

Komunitas pekerja informasi perlu meningkatkan pemahaman kebutuhan informasi masyarakat marjinal melalui survei dan penelitian-penelitian secara reguler. Diharapkan pula

mereka bekerja proaktif menggali kebutuhan masyarakat secara luas, dengan cara empati.

###

DAFTAR BACAAN

- Abdulmanan. 1995. "Peranan perpustakaan keliling dalam mengentaskan kemiskinan Informaasi di pedesaan." Dalam *BACA*, vol. XX, no. 5 (p.5-8)
- Ahmad, Rival G. dkk. 2003. "Dari parlemen ke ruang publik: menggagas proses pembentukan peraturan partisipatif." *Jentera, Jurnal hukum*, edisi 2, 2003, hal. 103-120.
- Basuki, Sulisty. 1991. "Pemakai, konsep, pendidikan dan masalahnya." Dalam *Majalah IPI*. Vol. 13, no. 1-4/Januari-Desember. (p. 17-29)
- "Belajar memperoleh informasi dari Swedia", *Kompas*, 17 Oktober 2001
- Biro Pusat Statistik. 1999. *Statistik kesejahteraan Rakyat, 1999 : survei sosial ekonomi nasional = Welfare statistics, 1999 : national socio-economic survey*.
- Danyawan, Gatot. 2000. "Degradasi Informasi." *Media Indonesia*. 6 Juni 2000. Hal. 17.
- Greenhalgh, Liz, Ken Worrpole with Charles Landry. 1995. *Libraries in a world of cultural change*. London: UCL Press.
- Jaeger, Paul T. & Thompson, Kim M. 2004. "Social information behavior and the democratic process: information poverty, normative behavior, and electronic government in the United States." In *Library & Information Science Research, an international journal*, Vol. 26, number 1, hal. 94-107
- Pradipto, Hendro Iwan. 2000. "Kekuatan informasi". *Media Indonesia*. 23 Mei, hal. 17
- "Oracle siap bantu Indonesia kembangkan e-Government." *Kompas*, 21 Juli 2004
- Ritonga, Harmonangan. 2004. "Mengapa kemiskinan di Indonesia menjadimasalah berkelanjutan?" dalam *Kompas*, 10 Februari.
- Setiarso, Bambang. 2000. "Potensi pemakai digital library di iNdonesia." Makalah dipresentasikan pada Seminar Perkembangan Perpustakaan Digital di Indonesia. Jakarta, Perpustakaan Nasional, 13 Desember
- Webster, Frank. 1995. *Theories of the information society*. London: Routledge.

